



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG : 2024
MASA PERSIDANGAN : II
RAPAT KE : 06
HARI : RABU
TANGGAL : 22 MEI 2024
PUKUL : 10.00 WIB SAMPAI SELESAI
TEMPAT : RUANG SIDANG UTAMA GEDUNG BARU DPRD KOTA PADANG
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD BIASA
SIFAT RAPAT : TERBUKA
ACARA RAPAT : **RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI TERHADAP LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2023**

SUSUNAN ACARA :

1. Pembukaan
2. Kata Pengantar Pimpinan Rapat
3. Melewakan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem
4. Penyampaian Laporan Gabungan Pansus I,II,III dan IV Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023
5. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD TA 2023
6. Pembacaan Kosep Keputusan DPRD terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023
7. Pengambil Keputusan
8. Penandatanganan MOU terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023
9. Penyampaian Kata Sambutan Pj.Wali Kota Padang

I. PIMPINAN RAPAT

Nama : **SYAFRIAL KANI, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang

II. SEKRETARIS RAPAT

Nama : **HENDRIZAL AZHAR, SH.MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Padang

III. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya : 11 orang
2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 9 orang
3. Fraksi Partai Amanat Nasional : 7 orang
4. Fraksi Partai Demokrat : 6 orang
5. Fraksi Fraksi Partai Golkar, PDI-P : 6 orang
6. Fraksi Partai Persatuan Berkarya Nasdem : 6 orang

IV. ANGGOTA YANG HADIR : 25 dari 45 Orang Anggota DPRD Kota Padang

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Syafrial Kani, SH	Gerindra	Ketua DPRD
2.	Arnedi Yarmen, S.Pd	PKS	Wakil Ketua DPRD
3.	Ilham Maulana, SH	Demokrat	Wakil Ketua DPRD
4.	Delma Putra	Gerindra	Anggota
5.	Dewi Susanti	Gerindra	Anggota
6.	Elly Thiryanti, SE.Akt	Gerindra	Anggota
7.	Budi.S, SH	Gerindra	Anggota
8.	Mastilizal Aye, SE	Gerindra	Anggota
9.	H.Ady Wijaya Kusuma	PKS	Anggota
10.	Pun Ardi, S.Ag	PKS	Anggota
11.	Ja'far, S.Hi	PKS	Anggota
12.	Rafdi, ST	PKS	Anggota
13.	H.Edmon, SE	PKS	Anggota
14.	Drs. H.Muhidi, MM	PKS	Anggota
15.	Djunaidy Hendry	PKS	Anggota
16.	Yandri, S.Pd.M.Pd	PAN	Anggota
17.	Jufri	PAN	Anggota
18.	Faisal Nasir	PAN	Anggota
19.	Irawati Mauraksa	PAN	Anggota
20.	Salisma, SH	Demokrat	Anggota
21.	Nila Kartika, A.Md	Demokrat	Anggota
22.	Zulhardi Z Latif, SH,MM	Golkar PDI-P	Anggota
23.	Miswar Jambak, SH	Golkar PDI-P	Anggota
24.	Resmita	P3Berkarya Nasdem	Anggota
25.	M.Fauzi	Demokrat	Anggota

V. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT : 4 orang

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dasman	P3Berkarya Nasdem	Anggota
2.	Drs. Wismar Penjaitan	Golkar PDI-P	Anggota
3.	Iswanto Kwara	Golkar PDI-P	Anggota
4.	Christian Rudy Kurniawan	Golkar PDI-P	Anggota

VI. ANGGOTA YANG ABSEN : 16 orang

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Amril Amin, SH	PAN	Wakil Ketua DPRD
2.	Manufer Putra Firdaus	Gerindra	Anggota
3.	Musnizen, SH	Gerindra	Anggota
4.	Amran Tono	Gerindra	Anggota
5.	Rustam Efendi	PAN	Anggota
6.	Asrizal	PAN	Anggota
7.	Donal Ardi	Gerindra	Anggota
8.	Boby Rustam	Gerindra	Anggota
9.	Muharlion, S.Pd	Golkar PDI-P	Anggota
10.	Surya Jufri, S.Sos	Demokrat	Anggota
11.	Yuhilda Darwis, SE	P3Berkarya Nasdem	Anggota
12.	Murikhwan	P3Berkarya Nasdem	Anggota
13.	Jumadi, SH	Golkar PDI-P	Anggota
14.	H. Khairul Karohan	P3Berkarya Nasdem	Anggota
15.	Osman Ayub	P3Berkarya Nasdem	Anggota
16.	Mukhlis, SE	Demokrat	Anggota

VII. UNDANGAN

- Wali Kota Padang
- Forkopimda Kota Padang
- Pengadilan Agama Kota Padang
- Lembaga Permayarakatan Kelas II.A Padang
- Kantor Kementerian Agama Kota Padang
- Sekretaris Daerah Kota Padang, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang
- Badan, Dinas, Instansi, PDAM, RSUD, Bagian dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- BUMD dan Perbankan
- Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Kepemudaan
- Wartawan, baik cetak maupun elektronik

JALANNYA RAPAT

MC : Memandu lagu Indonesia Raya

Pembacaan Do'a : Yang dipimpin oleh Marzuki, SH.M.Hum

Pimpinan Rapat :

impinan : **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang**

apat : Acara :

- Melewakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) anggota DPRD dari Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem sisa masa jabatan 2019-2024.
- Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023.

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

Assalamu'alaikum wr.wb
(Salam Sejahtera untuk kita semua)

Yth. Bpk. Pj.Wali Kota Padang

Yth. Bpk. Pimpinan Dan Seluruh Anggota DPRD kota Padang

Yth. Bpk. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Padang

Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kota Padang

Yth. Bpk. Kepala Lembaga Permsayarakatan kelas II.A Padang

Yth. Bpk. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang

Yth. Bpk. Plh. Sekretaris Daerah Kota Padang, Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan
Sekretaris DPRD Kota Padang

Yth. Bpk. Para kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur PDAM, Kepala Bagian dan Para camat
di lingkungan pemerintah kota Padang

Yth. Bpk. Pimpinan BUMD, BUMN dan Perbankan.

Yth. Ibu. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW dan Ketua Dharmawanita persatuan Kota
Padang

Yth. Ninik Mamak, Alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung limpapeh dalam rumah
gadang.

Yth. Bpk. Pimpinan Partai Politik, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

Yth. Wartawan baik cetak maupun Elektronik yang hadir pada saat ini

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Padang pada hari ini dengan agenda:

1. Melewakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) anggota DPRD dari Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem sisa masa jabatan 2019-2024.
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk agar kita senantiasa bertindak sesuai dengan aqidah ajaran agama islam.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada

bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat sekalian yang telah berkenan melangkah kaki serta meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami pada hari ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sesuai dengan peraturan DPRD Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata tertib DPRD Kota Padang Pasal 146 ayat (1), bahwa sebelum rapat paripurna Dewan ini kita buka, terlebih dahulu izinkanlah kami melihat daftar hadir anggota dewan YTH. **Alhamdulillah** dari 45 orang anggota dewan telah hadir dan menandatangani daftar

Hadir sebanyak hadir = 25 orang.

tidak hadir = orang.

dengan keterangan :

sakit= orang.

izin.....= 4 orang.

dan ditunggu kehadirannya = 16 orang

dengan demikian kuorum telah tercapai,

dan dengan mengucapkan "**bismillahirrahmanirrahim**" rapat paripurna DPRD kota padang pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum

(ketok palu 3 x kali)

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Untuk menghemat waktu kita masuk pada agenda pertama yaitu melewakan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) anggota DPRD dari Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem yaitu :

1. Saudara Helmi Moesim, S.IP dingantikan oleh Saudari Resmita
2. Saudara Zalmadi, SH dingantikan oleh Saudara H.Khairul Karohan

Dengan Ketukan palu 3 X

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 30 April 2024 yang lalu, Bapak Wali Kota Padang telah menyampaikan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut Pansus I,II,III dan IV DPRD Kota Padang dan SKPD Kota

Padang telah melaksanakan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pansus I,II,III dan IV sebagai berikut:

1. Rapat Internal Pansus I,II,III dan IV
2. Rapat Pembahasan Pansus dengan SKPD
3. Kunjungan Kerja Pansus
4. Rapat Internal Pansus menyusun laporan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Rapat Finalisasi Pansus
6. Rapat Fraksi-Fraksi menyusun Laporan Pendapat Akhir mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil rapat Badan musyawarah DPRD Kota Padang pada tanggal 20 Mei 2024 dijadwalkanlah rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Kita mulai dengan agenda mendengarkan Laporan Gabungan Pansus Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023, yang akan disampaikan oleh juru bicara gabungan pansus. Kepada juru bicara Gabungan Pansus dipersilahkan dengan segala hormat.

(Juru Bicara Menyampaikan Laporan Gabungan Pansus)

L A P O R A N HASIL PEMBAHASAN PANSUS GABUNGAN (PANSUS I, II, III DAN IV) RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamu'laikum Wr.Wb.

(Salam Sejahtera Untuk Kita Semua)

Yth. Bapak	Pj. Wali Kota Padang
Yth. Bapak/Ibu	Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kota Padang
Yth. Bapak	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang.
Yth. Bapak	Ketua Pengadilan Agama Kota Padang

Yth. Bapak	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang
Yth. Bapak	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
Yth. Bapak	Sekretaris Daerah Kota Padang, para Asisten, Staf Ahli, Inspektur dan Sekretaris DPRD Kota Padang
Yth. Bapak/Ibu	Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Kepala Bagian dan para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Yth. Bapak	Pimpinan BUMN, BUMD dan Perbankan.
Yth. Ibu	Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW Dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Padang.
Yth.	Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang Limpapeh Dalam Rumah Gadang.
Yth. Bapak.	Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Kepemudaan
Yth. Bapak	Wartawan Baik Media Cetak Maupun Media Elektronik

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yth.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam rangka Rapat Paripurna ini.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajak kita agar bertindak sesuai dengan aqidah dan ajaran agama.

Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua Anggota Pansus I, II, III dan IV Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan oleh Pansus Gabungan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang terhormat ini.

Pada kesempatan ini, sebagai Jurubicara Pansus Gabungan izinkanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus yang disingkat Pansus I, II, III dan IV yang telah dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kepala-kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum. Sebagai

pelaksanannya dalam lingkup Otonomi Daerah, maka dalam ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan Laporan Keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Untuk memenuhi maksud ketentuan di atas maka Rapat Paripurna DPRD hari Senin, 30 April 2024 Walikota Padang telah menyampaikan Nota Keuangan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Guna kelancaran pembahasan bersama sesuai mekanisme dan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pada rapat paripurna tersebut **telah ditetapkan pembentukan 4 (empat) Pansus** untuk pembahasannya dengan Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 02 Tahun 2024.

Pansus dimaksud diberi amanah untuk **melakukan pembahasan** terhadap LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 dengan Kepala-kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya dituangkan dalam Laporan yang disusun dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. KEGIATAN PEMBAHASAN LKPD TAHUN 2023
 - 3.1. Dasar Pelaksanaan
 - 3.2. Personil Panus I, II, III dan IV
 - 3.3. Pembiayaan
 - 3.4. Jadwal, lokasi dan mekanisme kegiatan pembahasan
- IV. HASIL PEMBAHASAN
- V. PENUTUP
 - 4.1. Kesimpulan
 - 4.2. Rekomendasi

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk mendeskripsikan kegiatan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 oleh Pansus DPRD Kota Padang sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

2.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai: 1) rekomendasi kepada Pemerintah Kota Padang guna perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depannya dan 2) instrumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah "akuntabilitas" bahwa Pansus DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan LKPD Tahun Anggaran 2023 dengan sebaik-baiknya.

III. KEGIATAN PEMBAHASAN LKPD TA 2023

3.1. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;
15. Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembentukan Struktur Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kota Padang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang

3.2. Personil Pansus LKPD DPRD

Berdasarkan Keputusan DPRD seperti dimaksud angka 16 di atas, maka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh Pansus I, II, III dan IV DPRD Kota Padang sesuai Mitrakerja masing-masing Komisi-Komisi DPRD Kota Padang yang berjumlah 45 orang Anggota DPRD. Hasil pembahasan Pansus I, II, III dan IV dibawa dalam Rapat Gabungan Pansus dan diformulasikan dalam kerangka struktur APBD terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan dan Belanja.

Adapun sekretariat pendamping Pansus DPRD Kota Padang yaitu:

1. Koordinator Umum yaitu Hendrizal Azhar, SH, MM selaku Sekretaris DPRD Kota Padang;
2. Koordinator Sekretariat Pendamping dan Sekretariat Pendamping masing-masing Pansus:
 - a. Koordinator Pansus I: Rusdaly Damsir, SH, MM, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Koordinator Pansus II: Rizal Febrinal, S.Hut, MM, Kabag Umum;
 - c. Koordinator Pansus III: Marzuki, SH, MH, Kabag Persidangan, Perundang-undangan dan Kehumasan;
 - d. Koordinator Pansus IV: Iwan Abdulrahman, SE, AKt, Kabag Program dan Keuangan

3.3. Pembiayaan

Pembiayaan untuk kegiatan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 cq. DPA Sekretariat DPRD Kota Padang pada kegiatan Pembahasan APBD. Sedangkan untuk Kepala OPD dan pendampingnya atau mewakilinya dibebankan pada DPA masing-masing OPD.

3.4. Jadwal, Lokasi dan Mekanisme Kegiatan Pembahasan

Kegiatan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan oleh Pansus I, II, III dan IV DPRD Kota Padang sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang secara efektif telah dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel Padang pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024 dengan mekanisme pembahasan melalui Rapat Internal, Rapat Rapat kerja bersama pimpinan OPD dan Stakeholder dan studi banding masing-masing Pansus ke daerah yang telah ditentukan serta Rapat Gabungan Pansus.

IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan	:	Rp.2.310.513.101.363,50
b.	Belanja	:	Rp.2.324.673.967.306,73
	Defisit	:	Rp.(14.160.865.943,23)
c.	Pembiayaan	:	
	Penerimaan	:	Rp.89.801.232.451,08
	Pengeluaran	:	Rp.15.480.985.208,00
	Pembiayaan Netto	:	Rp.74.320.247.243,08

Dengan uraian laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

4.1.1. Selisih Anggaran dengan Realisasi dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan setelah perubahan	:	Rp 2.431.902.343.228,00
Realisasi	:	Rp.2.310.513.101.363,50
Selisih kurang	:	Rp.121.389.241.864,50

4.1.2. Selisih Anggaran dengan Realisasi dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja setelah perubahan	:	Rp.2.499.903.575.679,00
Realisasi	:	Rp.2.324.673.967.306,73
Selisih	:	Rp.175.229.608.372,27

4.1.3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit dengan rincian sebagai berikut:

Defisit setelah perubahan	:	Rp.(68.151.232.451,00)
Realisasi	:	Rp.(14.160.865.943,23)
Selisih	:	Rp.(53.990.366.507,77)

4.1.4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan berimbang dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp.89.801.232.451,00
Realisasi	:	Rp.89.801.232.451,00
Selisih	:	Rp.

4.1.5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp.21.650.000.000,00
---	---	----------------------

Realisasi	: Rp.15.480.985.208,00
Selisih	: Rp.6.169.014.792,00

4.1.6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	: Rp.68.151.232.451,00
Realisasi	: Rp.74.320.247.243,08
Selisih	: Rp.(6.169.014.792,08)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	: Rp.60.159.381.299,85

SiLPA yang masih relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi.

Hal ini merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun, oleh karena itu Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Kota 1) mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan monitoring dan evaluasi, 2) meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil daerah, 3) melakukan rotasi dan mutasi jika diperlukan saja sehingga tidak mengganggu kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI), maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI nomor 30.B/LHP/XVIII.PDG/04/2024 tanggal 4 April 2024 yang memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2023.

Untuk menghindari terjadi temuan berulang atas kesalahan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD perlu ada solusi pencegahan sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi temuan yang berulang tiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dapat **disimpulkan** bahwa kegiatan pembahasan LKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 oleh Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV DPRD Kota Padang telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang dengan sebaik-baiknya.

5.2. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan *Pointers Hasil Pembahasan dan Rekomendasi terhadap Ranperda*

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 seperti dikemukakan di atas, maka telah disepakati saran/rekomendasi kepada Walikota Padang sebagai berikut.

1. Pendapatan

Capaian PAD di Tahun Anggaran 2023 sebesar 90.25% atau Rp.658.744.322.507,50 dari target sebesar Rp.729.911.859.086,00.

Beberapa catatan tentang OPD penghasil PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
 - Bapenda diminta untuk bertindak tegas kepada wajib pajak hotel dan restoran yang belum membayar pajak.
 - Terkait piutang kategori macet yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK, Bapenda diminta untuk segera menindaklanjuti dan bersikap tegas kepada wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan mereka.
 - Capaian target PAD-APBD-P yang hanya 85,34% harus ditindakanlanjuti secara serius oleh Pemko Padang. Minimal capaiannya 95%. Pemko Padang harus berupaya untuk bisa lebih meningkatkan capaian PAD tersebut agar program-program pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan optimal.
- 2) Dinas Perikanan dan Pangan agar melakukan kajian lebih dalam dan membuat SOP terkait dengan optimalisasi operasional pabrik es batu agar realisasi PAD bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun
- 3) Dinas Pertanian
 - Realisasi PAD Dinas Pertanian tahun 2023 sudah di atas 100 persen untuk di tingkatkan dan dipertahankan
 - Dinas Pertanian diminta serius dalam pemanfaatan Tahura Bung Hatta agar tidak menjadi beban anggaran melainkan menjadi sumber PAD. Jika Dinas Pertanian mengalami kesulitan dalam mengelolanya ada baiknya mencari investor (Pihak Ketiga).
 - Upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan operasional RPH, sebagai sumber utama PAD Dinas Pertanian
- 4) Bagian Perekonomian
 - Bagian Perekonomian diminta untuk terus mengawal BUMD agar berkontribusi positif terhadap PAD Pemko Padang selaku pemilik.
 - Bagian Perekonomian agar mendesak PSM untuk menjelaskan tentang penggunaan Penyertaan Modal Awal sebesar Rp.2 M.
- 5) Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM)
 - Manajemen PSM di minta untuk mengembangkan Pantai air manis agar PAD lebih di maksimalkan
 - Mengkaji kembali kelayakan/peleuang untuk bisa ikut sebagai distributor semen padang.
 - Mengkaji peluang untuk melaksanakan COR bisnis yang lain yang sudah ditetapkan dalam Perda Pendirian.
- 6) Bappeda harus dilibatkan dalam penetapan potensi pajak dan retribusi daerah.

2. Belanja

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2023 sebesar 92.99% atau Rp.2.324.673.967.306,73 dari target sebesar Rp.2.499.903.575.679,00.

Beberapa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap belanja pemerintah kota sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar memperhatikan warga Nias yang sudah lama menetap di Bungus namun belum punya KTP Kota Padang supaya diberi kesempatan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk nya.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta membuat sertifikat atas aset tanah milik pemerintah kota.
- 3) Meminta Dinas Perdagangan agar selalu aktif dalam pelaksanaan pengawasan pasar.
- 4) Dinas Perikanan dan Pangan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap nelayan yang menjual alat penangkapan ikan yang berasal dari bantuan Pemko serta melanjutkan dan menyelesaikan kajian ttg perubahan status UPTD menjadi BLUD di Balai Benih Ikan Bungus.
- 5) Dinas Pertanian diminta untuk memperbaiki penatausahaan dan pencatat aset agar lebih baik.
- 6) Bagian Perekonomian diminta untuk terus mengawal BUMD agar berkontribusi positif terhadap Pemko Padang serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perumda Kota Padang secara maksimal.
- 7) Manajemen Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) diminta untuk:
 - terus berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian selaku koordinator BUMD untuk terlaksananya tertib administrasi keuangan.
 - membuat terobosan atau berinovasi dalam mempromosikan Trans Padang agar masyarakat lebih beminat dalam penggunaannya
 - harus bisa mencari investor baik dalam/luar , agar tidak hanya mengandalkan APBD Kota Padang.
 - agar dapat melaporkan Penggunaan Penyertaan Modal Awal sebesar Rp.2 M kepada Pemko Padang.
- 9) Perusahaan Umum Daerah Air Minum diminta untuk menindaklanjuti permintaan dari Masyarakat Bungus Teluk Kabung agar bisa memanfaatkan penyambungan air bersih PDAM.
- 10) Meminta dukungan pengadaan exavator mini oleh PUPR dalam rangka percepatan pengerukan riol untuk antisipasi banjir pada musim hujan.
- 11) Pemko Padang perlu melakukan kajian yang matang dalam menetapkan anggaran OPD, sehingga tidak ada kelebihan anggaran yang mestinya bisa digunakan untuk pembangunan.
- 12) Diskominfo perlu mendapat perhatian dalam anggaran, hal ini mengingat adanya kebijakan satu data Indonesia (SDI), kemudian diperlukan inovasi dari diskominfo untuk mendukung digitalisasi agar layanan bisa maksimal dengan jumlah SDM yang optimal. Hal ini penting dalam penurunan belanja pegawai kita yang masih tinggi.

- 12) Terkait subsidi kepada Trans Padang yang besar. Kita meminta agar dilakukan kesiapan setiap trayek yang ada. Mana trayek yang produktif dan memang bermanfaat bagi masyarakat.
- 13) Dinas Sosial agar menindaklanjuti masalah data calon penerima Bantuan Sosial yang berasal dari Pokir agar penyalurannya bisa maksimal.
- 14) Pelaksanaan Pokir yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dikoordinasikan permasalahannya sehingga bisa dimaksimalkan realisasinya.
- 15) Dinas Pariwisata melakukan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata bersama dengan masyarakat atau dengan Badan usaha harus dilakukan dengan aturan yang jelas.
- 16) Bagian Kesra diminta untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat untuk pengurusan bagi penerima hibah agar tidak bolak balik dalam pengurusan dokumen dan dana nya cepat cair.

3. Tindak Lanjut terhadap LHP BPK RI

Beberapa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap temuan dalam LHP BPK RI sebagai berikut:

- 1) Catatan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari BPK yaitu Konstruksi dalam pekerjaan dan aset dimana pada Tahun 2017 ada DED dan masih tercatat dalam laporan keuangan dan diminta oleh BPK untuk berkoordinasi dengan bagian Aset dan kami juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat
 - 2) Temuan BPK di Kecamatan Kuranji
 - Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Jumlah Temuan 47.453.000 tindak lanjut sudah dilakukan reklasifikasi aset tetap ke belanja hibah dan dibuatkan berita acara serah terima hibah kepada penerima hibah.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah temuan 871.988.194 tindak lanjut akan dilakukan koordinasi ke bidang Aset BPKAD terkait pencatatan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.
 - 3) Terkait temuan BPK di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupa kesalahan rekening agar ditindaklanjuti dan tidak terjadi ke depannya lagi
 - 4) Pada RSUD dr. Rasidin Padang ditemukan kesalahan penganggaran yang seharusnya rekening belanja barang dan jasa menjadi belanja modal agar kedepannya lebih teliti dan hati-hati
 - 4) Terkait kesalahan data JKN pada Dinas Kesehatan yang belum valid agar segera dilakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait sehingga uddating data dapat diwujudkan.
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Dinas Pemadam Kebakaran agar segera konsultasi dan komunikasikan dengan inspektorat dan BPK terkait masalah salah rekening kegiatan rehab gedung.
- Selaku leading sektor perangkat daerah dalam bidang pengawasan,

Inspektorat diharapkan dapat melakukan pembinaan dan memberikan saran-saran baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBD bagi perangkat daerah lainnya. Inspektorat diminta untuk lebih teliti dalam menterjemahkan aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa, barang milik daerah, honorarium dan tambahan penghasilan bagi aparat sipil daerah.

Demikianlah laporan ini disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Fraksi-Fraksi dengan harapan kiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan seperlunya. Terima kasih.

Padang, 22 Mei 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
GABUNGAN PANSUS

Diketahui dan Disetujui:
Ketua DPRD Kota Padang

Juru Bicara:

H. SYAFRIAL KANI, SH

Tembusan Yth.

1. Saudara Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Padang
2. Saudara Ketua-Ketua Fraksi dan Ketua-ketua Komisi DPRD Kota Padang
3. Saudara Sekretaris DPRD Kota Padang
4. Arsip

pinan
at

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Terima Kasih kita aturkan kepada Bapak **Zulhadi Z Latif, SH.MM** selaku juru bicara gabungan Pansus yang telah menyampaikan laporannya dihadapan kita Bersama.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya kita masuk pada agenda yang kedua yaitu mendengarkan pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 dengan urutan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS disampaikan oleh Bpk Rafdi, ST

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah APBD Tahun 2023 (terlampir)

2. Fraksi Demokrat disampaikan oleh Bpk. M.Fauzi

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 (terlampir)

3. Fraksi Gerindra disampaikan oleh Elly Thrisyanti, SE.Akt

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, dengan catatan yang telah dibacakan tadi (terlampir)

4. Fraksi Golkar PDI-P disampaikan oleh Bpk. Zulhardi Z Latif, SH.MM

Fraksi Partai Golkar PDI-P DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 (terlampir)

5. Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem disampaikan oleh Ibu Resmita

Fraksi Partai Persatuan Berkarya Nasdem DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 (terlampir)

6. Fraksi PAN disampaikan oleh Bpk. Faisal Nasir

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Padang dapat menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ditetapkan menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 (terlampir)

Terima Kasih kepada seluruh juru bicara Fraksi-Fraksi atau perwakilannya yang telah menyampaikan pendapat akhir Fraksi-fraksinya dihadapan kita Bersama.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Kita masuk pada agenda selanjutnya yaitu Pembacaan Konsep Keputusan DPRD Kota Padang tentang: Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023.

Yang akan dibacakan oleh Sekretaris Dewan, untuk itu kepada Sekretaris Dewan kami persilahkan.

Sekretaris
Dewan

(Sekwan Membacakan Konsep Keputusan Dewan) Terlampir

pimpinan
Rapat

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Sekarang sampailah kita pada agenda berikutnya yaitu pengambilan Keputusan, untuk itu kami menyampaikan pertanyaan kepada anggota dewan Yth. Apakah Konsep Keputusan DPRD Kota Padang tersebut beserta lampirannya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kota Padang?

Peserta : **SETUJU**

Ketuk palu 1 X

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Dengan telah disetujuinya Konsep Keputusan dewan tersebut, izinkanlah kami untuk menandatangani dan akan diberi Nomor: 7 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda Pemerintah Kota Padang. Selanjutnya Keputusan ini beserta laporan gabungan Pansus serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Kami serahkan kepada Bapak Pj. Wali Kota Padang.

(ketua DPRD menyerahkan laporan Hasil Gabungan Pansus serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi kepada Bapak Pj.Wali Kota Padang)

Selanjutnya Penanda Tanganan MOU Persetujuan Bersama

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Agenda selanjutnya adalah kata sambutan Bapak Pj. Wali Kota Padang. Kepada Bapak Wali Kota Padang kami persilahkan.

Pj.
Walikota

(Pj. Wali kota Padang menyampaikan Sambutan) Terlampir

Pimpinan
Rapat

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dengan telah selesainya Bapak Pj.Wali Kota Padang menyampaikan sambutannya, maka berakhirlah acara rapat paripurna dewan pada hari ini.

Namun sebelum ditutup perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna dewan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua, dan atas kehadiran bapak/ibu, saudara/l semoga Allah mencatat sebagai amal saleh.

Akhir kata dengan mengucapkan : Alhamdulillahil'alamin". Rapat Paripurna DPRD Kota Padang pada Hari ini rabu tanggal 22 Mei 2024 secara resmi ditutup.

(ketok Palu 3 x)

Rapat ditutup pukul : 12.08 Wib.

PIMPINAN RAPAT
KETUA


2 SYAFRIAL KANI, SH